



## **BUPATI BUTON**

---

### **PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tahun 2013;
  - b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2013 ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11,);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton 2007-2011.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG RENCANAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Bupati Buton dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Buton Tahun 2013, adalah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012.
- (5) Daftar Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPA-SKPD adalah Daftar Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012.

## **BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

### **Bagian Pertama Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD Kabupaten Buton Tahun 2013 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton tahun 2012-2016;
- (2) RKPD Kabupaten Buton Tahun 2013 memuat hal sebagai berikut :
  - a. Rancangan Kerangka ekonomi makro tahun 2013
  - b. Arah kebijakan berupa :
    - 1). Prioritas Pembangunan;
    - 2). Rencana Kerja; dan
    - 3). Pendanaan

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RKPD Kabupaten Buton Tahun 2013 memiliki tujuan yaitu sebagai kerangka acuan bagi Instansi/Badan/Dinas/Kantor/Satuan Kerja Pemerintah dalam lingkup Kabupaten Buton didalam menyusun Rencana Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2013.

## **BAB III FUNGSI**

#### **Pasal 4**

RKPD Kabupaten Buton tahun 2013 menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membahas Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon anggaran yang akan diajukan kepada Dewan Pemerintahan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.

## **BAB IV RKA-SKPD SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1). Satuan Perangkat Kerja Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Buton tahun 2013 dalam menyusun dan membahas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

- (2) Hasil Penyusunan dan pembahasan (RKA-SKPD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menjadi kebijakan umum yang dilengkapi dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 4

## **BAB V LAPORAN SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH**

### **Pasal 6**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran yang berisi tentang keluaran dan kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dalam ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan;
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton yang bersangkutan;
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013;
- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dalam maksud pertimbangan, analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3), melakukan penyesuaian antara RKA-SKPD Kabupaten Buton Tahun 2012 dan hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**


Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyusun Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 4, ternyata pada saat pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat kesepakatan yang berbeda, maka Pemerintah Daerah menggunakan DPA - SKPD Kabupaten Buton Tahun 2012 hasil yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati Buton ini mulai berlaku pada tanggal saat diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati Buton ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 28 Mei 2012

**Pj. BUPATI BUTON, A.**  
  
**H. NASRUAN, S.H.**

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,**

**H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE.M.SI**  
**NIP. 19571231 199008 1 004**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2012 NOMOR**